

Pemberdayaan Pegawai Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara

FENDY .R. MAMADOA

ALDEN LALOMA

NOVVA N. PLANGITEN

ABSTRACT

This study aims to determine how Empowerment Of Employees In The Agency Public Protection Of National unity North Sulawesi. The data collection was conducted through interviews with 8 informan consist of : 1 leadership of agency heads, 2 heads of field, 1 head of sub fileds, 1 heads subpart, 3 staff. Based discussion Empowerment Of Employees In The Agency Public Protection Of National unity North Sulawesi yet fully based enabling and facilitating, but rather support by aspects conculting and collaborating. Therefore recommended that the Empowerment Of Employees adjustment need employees with different political,social,legal and national defense. And perform additional operational funds for stengthening the capacity of resource activities operatur, office also should include more employees in training activities socialization according to the field of work that the task could be running properly.

Keywords : Employee Empowerment

PENDAHULUAN

Paradigma Pemerintah Daerah yang akan dikembangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini bertumpu pada nilai demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan yaitu suatu Pemerintah Daerah yang memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam kewenangannya, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung kualitas

pelayanan publik yang diberikannya kepada masyarakat.

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik membawa konsekuensi terbukanya peluang (*opportunities*) sekaligus tantangan (*threat*) bagi daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintahan secara terdesentralisasi dengan paradigma demokratisasi, pemberdayaan aparatur dan masyarakat serta pelayanan umum,

sehingga sesuai dengan keinginan, harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi pemerintah di era globalisasi akan semakin berat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan masyarakat semakin berpengetahuan dan berpendidikan, sehingga permintaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan akan menjadi hal yang penting. Oleh sebab itu, organisasi pemerintah yang ada sekarang harus terus menata dirinya untuk menciptakan organisasi pemerintah masa depan yang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan mempunyai komitmen untuk menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa yang diberikan pemerintah.

Menurut Sadu Wasistiono (2003:7-9) bahwa peluang dan tantangan otonomi daerah berkaitan erat dengan upaya pencapaian tiga tujuan desentralisasi, yakni tujuan politik, tujuan administrasi serta tujuan sosial ekonomi. Tujuan politik dari desentralisasi adalah untuk menciptakan demokratisasi pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Melalui desentralisasi masyarakat di daerah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan mereka dengan demikian aspirasi dan kebutuhannya

dapat terakomodasi. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan politik dari desentralisasi adalah perlu adanya kesadaran dari semua pihak untuk mau berbagi dan mengambil peran sesuai porsinya masing-masing. Artinya bahwa pemerintah dan para elit politik mau melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan masyarakat pun diharapkan mau ikut serta dalam proses pembuatan, pelaksanaan serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh elit-elit politik.

Tantangan lain untuk mewujudkan tujuan politik tersebut adalah kehidupan perekonomian yang masih terpuruk, karena tanpa kondisi ekonomi yang memadai, para elit politik maupun masyarakat luas mudah terbujuk oleh politik uang. Tujuan administrasi adalah agar proses-proses administrasi, baik yang dijalankan oleh sektor publik maupun sektor privat menjadi lebih efektif, efisien, adil, serta ekonomis.

Peluang dan tantangan otonomi tersebut diatas perlu disikapi dengan baik dan sebijaksana mungkin oleh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara sebagai organisasi perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6

Tahun 2011 diberi tanggung jawab melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berbagai permasalahan yang berhubungan dengan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, politik dalam negeri, pemantauan orang dan organisasi kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.

Menyikapi beban kerja yang cukup berat apa lagi yang berkaitan dengan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan politik dalam negeri seperti kegiatan pemilu dan pemilukada yang banyak menjadi perhatian dewasa ini maka diperlukannya aparatur yang memiliki kemampuan yang baik untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada.

Upaya mempersiapkan sumber daya aparatur yang siap pakai selain melalui kegiatan seleksi dan penempatan yang tepat, juga dilakukan dengan bentuk kegiatan pemberdayaan pegawai. Pemberdayaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memberikan daya dan kemampuan kepada pegawai oleh organisasi yang dalam hal ini Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara sehingga pegawai yang ada memiliki kemampuan yang baik untuk menjalankan tugas yang ada. dari penjelasan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul : ***Pemberdayaan Pegawai Di Badan Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi utara.***

METODE PENELITIAN

Metode Yang Digunakan

Metode yang di gunakan adalah kualitatif Peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menjelaskan pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang dalam hal ini mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meneliti fenomena-fenomena pemberdayaan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, dimana peneliti adalah sebagai alat utamanya. Peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menjelaskan pemberdayaan pegawai yang dilakukan di

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang dalam hal ini mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Bogdan & Biklen, 1998).

Sumber Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Pemberdayaan organisasi. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Data primer dan (2) Data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan menjelaskan pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.

Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan menjelaskan pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.

D. Informan

Para informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kebutuhan data sebagaimana permasalahan yang di kaji yaitu yang berkaitan dengan

menjelaskan pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dan didasarkan pada kriteria: (1) memahami kegiatan pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara; (2) menyatu dengan aktivitas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, (3) aktif terlibat dalam kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara;(4) memiliki waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti; dan (5) Subjek yang tidak mengemas informasi, tetapi relatif memberikan informasi yang sebenarnya. Informan yang rencananya akan diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari :

Unsur Pimpinan(Kepala Badan/Sekretaris Badan)	: 1 Orang
Unsur Kepala Bidang	: 2 Orang
Unsur Kepala Sub Bidang	: 1 Orang
Unsur Kepala Sub Bagian	: 1 Orang
Unsur Staf	: 3 Orang.

E. Instrumen Penelitian

Untuk dapat memahami makna dan kualitas penafsiran terhadap fenomena pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara maka instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang secara langsung

berhadapan dengan subjek-subjek yang diteliti dan tidak dapat digantikan oleh alat lain ataupun oleh orang lain. Dalam penelitian ini selain peneliti sebagai instrumen utama, peneliti menggunakan alat bantu seperti alat perekam suara (tape recorder), alat rekam visual (video recorder), alat tulis, serta laptop untuk menyimpan data hasil penelitian serta pedoman wawancara yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti yang berkaitan dengan pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif dimana peneliti sendiri sebagai instrumen dalam penelitian dengan menggunakan :

- (1) pedoman wawancara terbuka (peneliti bertatap muka langsung dengan informan). Teknik pengumpulan data ini yang digunakan melalui komunikasi langsung dengan informan yang dianggap mengetahui dan menguasai serta memahami informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) observasi langsung kelokasi penelitian dengan cara mengamati secara langsung proses yang terjadi dalam pemberdayaan

pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara serta kenyataan yang sebenarnya terjadi;

- (3) penggunaan dokumen yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang terkait baik yang bersifat kajian teoritik maupun dokumen yang ada pada objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.

G. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan analisis data menurut model interaksi analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman (1984). Kegiatan analisisnya dimulai dengan mengumpul data di lapangan, mereduksi data, menyajikan data, dan akhirnya menarik kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan terus-menerus sesuai siklus gambar di atas selama pengumpulan data berlangsung baik yang berhubungan dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sulawesi Utara yang kesemuanya berkaitan dengan membuat mampu(enabling),memperlancar(fasilitating),berkonsultasi(consulting),berkerjasama(collaborating),membimbing(mentoring), dan mendukung (supporting).Reduksi data adalah bagian dari kegiatan analisis data yang digunakan selama pengumpulan data. Penyajian data dimuat dalam bentuk deskripsi hasil penelitian dan dianalisis. Setiap data hasil reduksi, dianalisis dan ditarik kesimpulan sementara. Jika data yang disajikan belum dapat disimpulkan, data tersebut direduksi dan disesuaikan dengan data lain untuk diperbaikinya. Apabila data tersebut telah dianggap layak untuk disimpulkan, maka ditarik kesimpulan-kesimpulan.

PEMBAHASAN

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, termasuk di dalamnya pembentukan Badan Kesatuan Bangsa

Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk menjabarkannya lebih lanjut Peraturan Daerah tersebut maka dikeluarkanlah peraturan Gubernur Sulawesi Utara Noimor 22 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan politik Provinsi Sulawesi Utara.

Badan kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik.. Untuk melaksanakan tugas dimaksud maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis.
- 2) Penyusunan Perencanaan, Pengkoordinasian, Dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas.
- 3) Pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretarian, bina ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, perlindungan masyarakat dan politik dalam negeri. Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi maka berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan) Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari :

- a) Kepala Badan
- b) Sekretaris Badan. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Hukum Dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan dan Sub Bagian Umum
- c) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membawahi : Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan
- d) Bidang Kewaspadaan Nasional membawahi : Sub Bidang Penanganan Konflik dan Sub Bidang Pemantauan Orang Dan Lembaga Asing.
- e) Bidang Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Masyarakat membawahi : Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Keagamaan dan Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat Seni, Budaya dan Ekonomi.
- f) Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi : Sub Bidang Politik Pemerintahan dan Sub Bidang

Fasilitasi Parpol, Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian, peneliti menilai bahwa permasalahan pemberdayaan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara lebih banyak berkaitan dengan *enabling*, *facilitating*, *consulting* dan, *collaborating*. Permasalahan yang berkaitan dengan mentoring dan supporting dinilai oleh peneliti banyak berkaitan dengan aspek *consulting*. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan dengan *enabling*, *facilitating*, *consulting* dan, *collaborating* atau membuat mampu, memperlancar, berkonsultasi dan bekerjasama.

1. Aspek *Enabling*

Membuat mampu dipahami dengan memastikan bahwa pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang akan diberdayakan mempunyai segala sumber daya yang diperlukan untuk dapat diberdayakan secara penuh. Menjadi sebuah tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara untuk pegawai yang ada menjadi semakin berdaya sehingga mereka menjadi mampu dalam menjalankan pekerjaan dalam bidang kerjanya masing

masing sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

2. Aspek *Facilitating*

Pemberdayaan melalui aspek *facilitating* atau memperlancar dalam penelitian ini berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana kantor, keuangan untuk operasional.

3. Aspek *Consulting*

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, pegawai harus dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Apabila pegawai tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi, diperlukan konsultasi untuk mencari jalan keluar. Konsultasi yang utama merupakan tugas dan tanggungjawab dari pimpinan. Pimpinan berkewajiban untuk menyediakan waktu kapanpun untuk pegawai yang berkonsultasi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan pekerjaan pada bidang tugasnya.

4. Aspek *Collaborating*

Kerjasama antara pegawai baik unsure staf maupun dengan pimpinan merupakan tujuan terakhir dari setiap program pemberdayaan yang dalam artian bahwa pegawai yang ada melalui kerjasama yang dilakukan secara bebas, terbuka, dan penuh dapat memanfaatkan seluruh kekayaan kecakapan atau potensi dan pengetahuan dalam organisasi untuk

mencapai tujuan organisasi. Demikian pula halnya dengan pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. Permasalahan kerja sama diperlukan bukan hanya pada masing masing seksi, atau dalam bidang masing-masing akan tetapi antar bidang pun diperlukan kerjasama guna mensinergikan program kerja dan dalam upaya mempermudah tercapainya tujuan atau visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. Pemberdayaan mendatangkan manfaat itu dengan meniadakan halangan dan hambatan kerja yang diakibatkan oleh pengendalian ketat akibat pendekatan manajemen tradisional. Bennis dan Mische (1995:45) menjelaskan bahwa pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokrasi yang mengkotak-kotakan orang dan membuat mereka menggunakan seefektif mungkin keterampilan, pengalaman, energi dan ambisinya. Kebiasaan para birokrat yang membatasi diri pada level jabatan tertentu membuat yang bersangkutan tidak dapat berkerja sama dengan orang lain.

Oleh karenanya pemberdayaan pemberdayaan pegawai diperlukan untuk menjawab kekuatan sosial yang tidak seimbang oleh karena itu diperlukan intervensi yang tepat dan langsung ditujukan kepada pegawai untuk

mengatasi kesenjangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga pegawai dapat benar – benar menjalankan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan bidang pekerjaan berjalan dengan baik. Pemberdayaan yang berupa dorongan bekerja keras merupakan upaya memacu semangat yang ada dalam diri setiap orang untuk mampu melakukan sesuatu hal yang lebih. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi dalam diri pegawai berkembang diawali dengan dorongan bekerja keras yang dilakukan oleh pimpinan melalui kerjasama yang ditunjukkan dalam setiap pekerjaan dengan siasat yang ada. Pimpinan dapat memberikan contoh dan teladan dalam bekerja. Dengan contoh dan teladan yang ditunjukkan maka staf yang ada dengan sendirinya akan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh pimpinan. Kerja keras akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas (hasil) kerja. Selain dengan kerjasama ini akan tercipta semangat kerja yang tinggi dalam diri pegawai sehingga berkinerja baik bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.

Oleh karenanya penting dalam pemberdayaan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dalam peningkatan aspek *collaborating* baik untuk masing – masing program kerja antara antar bidang maupun dalam bidangnya itu sendiri maupun *collaborating* penetapan program kerja sehingga pegawai menjadi lebih berdaya dan mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terungkap bahwa pemberdayaan pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya berdasarkan *enabling* dan *facilitating*, akan tetapi lebih ditunjang oleh aspek *consulting* dan *collaborating*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penelitian ini menyarankan beberapa hal yaitu : (1). Perlunya penyesuaian pegawai dengan latar belakang social, politik, hukum maupun ketahanan nasional. (2).Melakukan penambahan dana operasional untuk kegiatan penguatan kapasitas sumber daya aparatur. (3). Melakukan penyusunan pelatihan pegawai yang berkaitan dengan masalah social, politik, hukum maupun ketahanan

nasional. (4).Mengikutsertakan lebih banyak lagi pegawai dalam kegiatan pelatihan maupun sosialisasi sesuai dengan bidang pekerjaannya. (5).Melakukan perbaikan pada sarana kantor seperti gedung dan penambahan fasilitas kantor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan,. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencan.
- Clutterbuck David. 1995. *The Power of Empowerment. Release the Hidden Talents of your Empoloyees*. London : Clutterbuck Associates.
- Cook, Sarah and Steve, Macaulay, 1997. *Perfect Empowerment Pemberdayaan yang Tepat*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Rohidi dan Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI-Press.
- Pranarka.1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia; Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, .Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akontabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.

Sumber-Sumber Lain :

- Undang – Undang No 32 tahun 2004.
Undang – Undang No 12 tahun 2008.